

**PROLIFERASI DINASTI POLITIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2010-2020**

Oleh: Nindi Safitri Permana

e-mail: nindi.safitri2000@gmail.com

Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Political dynasty is understood as a form of control of power in government at the local level. A political dynasty in the traditional political sense is which the rulers seek place their families, brothers and relatives in strategic positions whit the goal of building a political empire whitin government. This effort is made with the purpose of those who become members of the political dynasty will keep one another in power (executive, legislative or judicial). Putting a family or brother in positions of stress will make it easier for a ruler to control and control all the things a ruler needs (Agustino, 2014).

The goal of this study is to find out ho the use of poer for political dynasties in the district of the Kuantan Singingi 2010-2020. The study involves a qualitative approach. The research location is conducted in Kuantan Singingi district, and data collection techniques are done with interviews and documentation. The result of this study was the us of power to develop the political dynasy of H. Sukarmis in Kuantan Singingi regency through his power in the Golkar party then spread to the position pf the DPRD and then to the position of the Regent. The Sukarmis family took control of the government, the economy and began to spread to community organizations such as the Golkar, KNPI, Tarbiya-perti and have patron-client relationships. This power is used to develop and defend the political dynasty in the district of Kuantan Singingi.

Keywords: Proliferation, Power, Dynasty Politics

A. PENDAHULUAN

Fenomena dinasti politik dalam ranah lokal muncul seiring dengan berlakunya Pemilu langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2001. Seiringan dengan berjalannya kedua proses tersebut sebagai wujud demokratisasi di aras lokal, berbagai elit bermunculan di daerah untuk ikut ambil bagian dalam kedua proses tersebut. Dalam kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menetapkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya (Djati, 2013). Politik dinasti atau politik nepotisme, dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarkhi politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan (Meitzner, 2009).

Dinasti politik dipahami sebagai wujud kontrol kekuasaan pada pemerintahan di tingkat lokal. Dinasti politik dalam artian politik tradisional yaitu dimana penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan saling menjaga agar kekal dalam kekuasaan (eksekutif, legislatif maupun yudikatif). Menempatkan keluarga atau saudara di jabatan-jabatan strategis akan memudahkan penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa (Agustino, 2014). Hal ini tentu akan mempersempit kesempatan orang lain untuk ikut

berpartisipasi dalam lembaga politik maupun lembaga pemerintahan, karena calon pemimpin yang di usung politik dinasti lebih banyak mendapatkan dukungan. Dan sekarang ini para pejabat negara ini sedang berlomba-lomba untuk mengusung sanak keluarga, saudara, kerabat, dan orang-orang terdekat mereka untuk mengisi jabatan-jabatan di wilayah kekuasaannya, baik dipusat maupun di daerah.

Menguatnya politik dinasti juga merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistik, maka peran partai politik menjadi semakin berkurang, dan kekuatan individu para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi partai politik untuk memenangkan posisi-posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat. Partai politik tampaknya lebih mementingkan kemenangan, dan kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga abnormali maupun absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh parpol-parpol besar demi terjaminnya kemenangan dalam Pilkada (Harjanto, 2011).

Menurut (Handoko, 2020) dalam riapos ada empat faktor yang menyebabkan dinasti politik tumbuh subur dalam tubuh partai politik di Indonesia, Pertama, tidak adanya pembatasan periodisasi kepengurusan dalam tubuh partai politik. Kedua, Undang-Undang

Pemilu dan Pilkada yang mensyaratkan dukungan tertulis dari DPP partai politik itu sendiri, juga keengganan para pendiri partai untuk mengurangi dominasinya dalam tubuh partai politik. Keempat, tidak berjalannya fungsi komunikasi politik, sosialisasi/pendidikan politik, suksesi kekuasaan dan pengaturan konflik oleh partai politik.

Perubahan Orde Baru menjadi Reformasi diikuti pergeseran sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang mempengaruhi perkembangan politik lokal. Di dalam desentralisasi terdapatnya hak otonom yang dimiliki daerah menciptakan beragam partisipasi bahkan kontestasi oleh elite politik lokal dalam memperoleh, menjalankan serta mempertahankan legitimasi mereka dalam masyarakat (Zuhro, 2009). Desentralisasi yang tujuannya untuk pengembangan daerah secara mandiri justru lebih didominasi oleh pertarungan elit politik maupun elit birokrasi. Hal ini ditandai dengan berkembangnya jumlah aktor yang ikut berperan dalam menentukan kebijakan publik, baik dari level pusat maupun daerah dengan praktiknya yang beragam. Perubahan sistem politik yang tidak lagi memusat juga berdampak pada munculnya politik oligarki dan otoritarianisme baru. Kondisi tersebut tercipta akibat dari munculnya *local strongmen* yang selama Orde Baru aspirasi politiknya terkebiri.

Dalam penelitian (Holifah, 2018) menjelaskan tentang *local strongmen* dalam pemilihan kepala daerah, bahwa fenomena orang kuat lokal merupakan salah satu bentuk strategi kemenangan kandidat. Kemenangan kandidat pada pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh keterlibatan sosok blater atau orang kuat lokal yang menjadi kekuatan dibelakang kandidat. Orang kuat lokal mempengaruhi suara masyarakat untuk memilih calon kandidat yang diusung dalam pemilihan umum. Dalam penelitian lain (Minan, 2015) menjelaskan bahwa *Local strongman* merupakan aktor tingkat lokal

yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, sebagai elit lokal di dalam struktur sosial, mereka adalah administrator, agiator, pemersatu, penyebar, propaganda, ideologi, dan broker politik. *Local Strongman* (elite lokal) inilah yang akan melahirkan dinasti politik baru, pola korupsi baru dan penyalahgunaan wewenang (Purnomo, 2012).

Di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri yang berperan sebagai *Local Strongman* adalah H. Sukarmis, sosok politikus kelahiran Sentajo Raya pada tahun 1956 ini salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di Kuantan Singingi, ia telah menduduki banyak jabatan-jabatan penting di Kuantan Singingi, mulai dari awal pemekaran tahun 1999 ia sudah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian menduduki jabatan tertinggi sebagai Bupati selama dua periode berturut-turut, tentu dengan memungkinkan untuk mendukung keluarga dalam politik. Dalam jurnal (Tito, 2020) menyebutkan, dalam memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi, kemenangan Andi tidak lepas dari dukungan Sukarmis sebagai mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kuantan Singingi dan sebagai Ketua Penasehat DPD II Partai Golkar Kuantan Singingi. Bahwa Sukarmis mendukung pemimpin muda secara tidak langsung merujuk kepada Andi Putra yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Kuantan Singingi dan begitu halnya dengan perjalanan politik Andi sebagai Ketua DPRD.

Fenomena dinasti politik ini sudah berkembang diberbagai daerah di Indonesia, terutama di pemerintahan daerah, seperti di Kabupaten Kuantan Singingi beberapa tahun belakangan ini, dimana H. Sukarmis yang merupakan mantan Bupati Kuantan Singingi periode 2006-2011 dan periode 2011-2016 melenggangkan putra-putranya untuk ikut

berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2020 H. Sukarmis mendukung Andi Putra menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Prestasi Sukarmis di dalam dunia politik tidak diragukan lagi, ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD partai Golkar Kuantan Singingi selama lima tahun, dan ia juga menjadi Ketua DPRD selama dua periode. Memiliki latar belakang sebagai senior politik tentu memperkuat dukungan Sukarmis untuk putra-putranya diantaranya adalah Andi Putra dan Adam.

Tabel 1. 1 Jabatan Politik H. Sukarmis

No	Jabatan Politik	Periode
1	Ketua DPRD Kabupaten Kuansing	Dua Periode (1999)
2	Bupati Kuansing	2006-2011
3	Bupati Kuansing	2011-2016
4	Ketua DPD II Partai Golkar Kuansing	2015
6	DPRD Provinsi Riau	2019-Sekarang

Sumber data: Media., Olahan Penulis, 2020.

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa H.Sukarmis sudah banyak menduduki berbagai jabatan di pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, dari menjabat sebagai Ketua DPRD dua periode pada awal pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, dan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar di tahun 2015 hingga menjadi Bupati Kuantan Singingi dalam dua periode. Karir politik yang dimiliki H. Sukarmis tentunya akan mempermudah ia untuk mendukung putra-putranya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik di daerah Kabupaten Kuantan Singingi, karena Sukarmis sudah mempunyai nama yang besar dalam dunia politik Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari rekam jejaknya diatas.

Tabel 1. 2 Jabatan Politik Andi Putra

No	Jabatan Politik	Periode
1	Ketua DPRD Komisi C Kabupaten Kuansing	2009-2014
2	Ketua DPD II Partai Golkar Kuansing	2016
3	Ketua DPRD Kabupaten Kuansing	2014-2019
4	DPRD Terpilih Dapil 1 Kuansing	2019-2020
5	Bupati Kuansing Terpilih	2021-Sekarang

Sumber Data: Media., Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Andi Putra juga telah banyak menduduki jabatan-jabatan politik di Kabupaten Kuantan Singingi, Andi menggantikan H. Sukarmis secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kuantan Singingi. Bukan hanya itu Andi juga menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi ia menjabat selama tiga periode. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, Andi Putra meraih 4.185 suara, perolehan suara tersebut menjadikan Andi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2019-2024.

Pada tahun 2020 ini Andi Putra ikut memeriahkan Pilkada dengan maju sebagai calon Bupati Kuantan Singingi periode 2021-2026 sebagai perwakilan partai Golkar bersama Suhardiman Amby sebagai Wakil Bupati dari partai Hanura, Andi Putra adalah anak dari Sukarmis mantan Bupati Kuantan Singingi dua periode, sekarang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau. Dengan adanya pengaruh Sukarmis, secara tidak langsung memberikan pengaruh pada pemilihan dan dukungan suara untuk Andi pada Pilkada Kuantan Singingi tahun 2020 ini (Sepiyana, 2020).

Tabel 1. 3 Jabatan Politik Adam

No	Jabatan Politik	Periode
1	Anggota DPRD Kuansing Dapil II	2014-2019
2	Anggota DPRD Kuansing Dapil II	2019-2024
3	Ketua DPRD Kuansing	2021 – Sekarang

Sumber Data: Media., Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.3 Adam menjadi anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai fraksi partai Golkar selama dua periode, Adam terpilih melalui Dapil II Kuantan Singingi yang meliputi Kecamatan Kuantan Hilir, Cerenti, Pangean, Logas Tanah Darat, Inuman dan Kuantan Hilir Seberang. Pada periode pertama Adam menjadi anggota termuda di usia 21 Tahun ia sudah menjadi anggota dewan di Kabupaten Kuantan Singingi (Susandi, 2019). Pada Pemilu tahun 2019 Adam meraup suara sebanyak 2.064 yang menghantarkannya duduk di lembaga legislatif Kabupaten Kuantan Singingi. Pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki H. Sukarmis dan Keluarga baik pada bidang eksekutif maupun bidang legislatif, pengaruh yang sangat besar dalam bidang politik ini sudah mengalami *proliferasi* (persebaran, perluasan dan pertumbuhan) pada bidang organisasi masyarakat. Pada awalnya H. Sukarmis dan Keluarga memang memiliki pengaruh di partai Golkar, melihat dinasti politik mereka diawali pada partai Golkar, pada tahun 2016 Andi Putra menggantikan Sukarmis sebagai Ketua DPD II Partai Golkar, kemudian Adam dan Romi juga berada di partai yang sama.

Semakin banyaknya pemerintahan di aras lokal yang melakukan dinasti politik semakin jauh pula kita dari penerapan demokrasi yang sehat, seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi selama beberapa tahun belakangan ini, dinasti politik berkembang

sangat pesat. Dinasti politik di Kabupaten Kuantan Singingi telah mengalami *proliferasi* (penyebaran dan perluasan) di luar dari bidang eksekutif, legislatif, yang mulai menduduki organisasi-organisasi masyarakat, di mulai dari partai politik (Partai Golkar), organisasi keagamaan dan organisasi pemuda.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah pengembangan dinasti politik yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Maka masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan kekuasaan untuk pengembangan dinasti politik di Kuantan Singingi

C. KERANGKA TEORI

1. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Michael Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur, kekuasaan ada dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Konsep kekuasaan Michael Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian dan Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam satu hubungan kepemilikan sebagai property, perolehan, atau hak istimewa yang dapat dianggap oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah.

2. Penyebab Berkembangnya Dinasti Politik

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal yang

menyebabkan dinasti politik berkembang dan bertahan pada ranah lokal diantaranya:

Ronald Mendoza menyebutkan politik dinasti muncul disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat ditempat tersebut lemah. Hubungan antara dinasti politik dan aspek sosial ekonomi rata-rata, dinasti politik tersebar di usia yang berada di daerah tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta kesenjangan dan pendapatan rata-rata lebih rendah. Kondisi sosial ekonomi yang lebih baik memberikan peluang lebih rendah untuk terbentuknya dinasti politik. Sementara kondisi ekonomi lemah memiliki peluang lebih tinggi untuk membentuk dinasti politik (Mendoza, 2012).

Menurut Agus Sustina dinasti politik Atut Chosiyah di Banten berkembang karena mereka menguasai sumberdaya politik dan ekonomi, termasuk organisasi kemasyarakatan (Sutisna, 2017).

Menurut J.C Teehankee dalam jurnal penelitiannya kasus dinasti politik di Filipina, politik dinasti berkembang dengan prinsip parton-klien. Sistem sosial yang ada pada masyarakat sejak awal peradaban masyarakat Filipina, sudah membentuk kelas sosial atau budaya patron klien/penguasa dan bawahan. Keberadaan klan-klan ini terus bertambah yang berkolaborasi dengan partai serta loyalitas klan yang tinggi semakin memperkuat posisi politik dinasti. Dimana penguasa bekerjasama dengan masyarakat yang tergantung kepada penguasa tersebut dalam sebuah kontrak yang saling menguntungkan yang mengakibatkan langgengnya dinasti politik. (Teehankee, 2012)

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011). Craswell 2007 dalam (Adlin, 2013) memaparkan karakteristik penelitian kualitatif adalah dilakukan dalam kondisi yang sangat alami (*natural setting*), maksudnya penelitian mengumpulkan data melalui interaksi tatap muka dengan informan dilapangan pada saat partisipan sedang mengalami masalah yang diselidiki. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan informan kunci (*Researcher as key instrument*), maksudnya peneliti sendirilah yang mengumpulkan data-data yang ia butuhkan dengan cara mempelajari dokumen, mengamati perilaku, dan mewawancarai partisipan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih guna menggambarkan bagaimana bentuk proliferasi dinasti politik dan penyebab berkembangnya dinasti politik tersebut.

Data diperoleh dengan melakukan wawancara bersama informan dan penelusuran dokumen lain yang mendukung penelitian. Informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 4 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Syafruddin	Ketua Partai Golkar Kec. Benai	1
2	Puri	Anggota Partai PDIP	1
3	Dr. Tito Handoko, S.IP, M.Si	Pengamat Politik	1
4.	Mulyadi, S.Ag	Tokoh Masyarakat	1
Total			4

*Sumber: Data olahan penulis
2020*

E. PEMBAHASAN

1. Penggunaan Kekuasaan untuk Pengembangan Dinasti Politik di Kuantan Singingi

Terbentuknya dinasti politik di Kuantan Singingi tidak lepas dipengaruhi oleh iklim politik Indonesia yang berkembang di Indonesia secara umum. Terlebih dalam konteks Pilkada sendiri tidak ada aturan yang melarang bahwa dalam lingkungan keluarga maju dalam posisi dalam calon kepala daerah ataupun dewan perwakilan rakyat dalam level daerah. Tentu dengan tidak adanya regulasi yang mengatur secara spesifik ini memungkinkan semua orang yang memiliki sumber daya atau risosis dan memiliki berbagai macam modal sosial, modal politik dan modal ekonomi untuk mengembangkan diri dan keluarganya serta jaringan-jaringan disekitarnya memperlebar arus kekuasaan di daerah. Penggunaan kekuasaan untuk pengembangan dinasti politik di Kuantan Singingi terlihat dari beberapa fenomena berikut, pada tahun 2016 Andi Putra terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kuantan Singingi menggantikan Sukarmis, dukungan Sukarmis pada Andi terlihat pada saat Sukarmis memberikan kata sambutan saat pembukaan Musda IV DPD II Golkar Kuansing, Sukarmis mendukung pimpinan muda secara tidak langsung merujuk pada Andi.

Kemudian pada tahun 2019 Sukarmis, Andi Putra, Adam dan Romi Alfisyah Putra memenangkan pemilihan legislatif melalui partai Golkar. Sukarmis berhasil mendapatkan suara tertinggi caleg DPRD Riau dari Dapil Riau 8 yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu-Kuansing, di Indragiri Hulu Sukarmis berhasil meraup 2.882 suara dan di

Kabupaten Kuantan Singingi, ia berhasil mengumpulkan 34.510 suara. Andi Putra maju di Dapil I Kuansing yang meliputi Kuantan Tengah, Sentajo Raya dan Benai. Ia berhasil mendapatkan 4.185 suara, sekaligus tercatat sebagai caleg dengan suara tertinggi di Dapilnya yang menjadikan ia sebagai Ketua DPRD Kuansing untuk ke 3 (tiga) kalinya, di Dapil yang sama sang kakak yaitu Romi Alfisyah Putra meraih 2.110 suara yang menjadikan ia sebagai anggota DPRD, selanjutnya Adam maju pada Dapil II yang meliputi wilayah Pangean, Kuantan Hilir Seberang, Kuantan Hilir, Inuman, Cerenti dan Logas Tanah Darat, ia meraih 2.064 suara dan lolos ke lembaga legislatif (cakaplah.com, 2019).

2. Kekuasaan Pada Suprastruktur Politik

Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi dikenal sebagai salah satu Kabupaten yang sedang membangun Dinasti politik. Dinasti politik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari struktur kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga H. Sukarmis. Struktur kekuasaannya terdapat dalam suatu sistem politik terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan-badan peradilan.

a. Kekuasaan Pemerintahan (Birokrasi)

Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan para pejabatnya secara bersama-sama berkepentingan dalam komunitasnya. Dalam pemerintahan, kekuasaan politik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi mempunyai tiga arti sebagai tipe organisasi yang khas, sebagai suatu sistem, dan sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk mencapai tujuannya.

Tabel

**Nama-nama Kerabat H. Sukarmis
dalam Birokrasi**

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Sukarmis	H. Sukarmis aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai sekarang. H. Sukarmis pada awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi menjabat sebagai Ketua DPRD selama 2 periode, menjadi Bupati pada tahun 2006-2011 dan 2011-2016.
2.	Andi Putra	Andi Putra aktif sebagai Bupati Kuansing terpilih pada Pemilu tahun 2020 kemarin. Andi pernah menjadi Ketua DPRD Komisi C Kuansing pada tahun 2009-2014, menjadi Ketua DPRD Kuansing selama tiga periode.
4.	Adam	Adam sekarang menjadi Ketua DPRD Kuansing menggantikan Andi Putra yang menjabat sebagai Bupati, Adam pada tahun 2014-

		2019 dan tahun 2019-2024 terpilih menjadi anggota DPRD Kuansing Dapil II.
5.	Romi Alfisah Putra	Ketua Komisi III DPRD Kuansing. Pada tahun 2018 ia merupakan pengusaha, namun pada tahun 2019 mengikuti jejak Ayah dan adiknya dalam dunia politik.
6.	Cucu Sukarmis, Indra Putra	Indra Putra ikut mencalonkan diri sebagai Bupati Kuansing pada periode 2021-2026 bersama Mursini, sebelumnya Indra terpilih sebagai anggota DPRD Riau Dapil Indragiri Hulu-Kuantan Singingi tahun 2014-2019, dan tahun 2015 memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kuansing periode 2016-2026.

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keluarga H. Sukarmis di Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai pengaruh yang sangat besar dimana mereka sudah banyak menduduki jabatan baik pada kekuasaan formal maupun informal.

b. Kekuasaan Parlemen Lokal
atau DPRD

Kekuasaan keluarga H. Sukarmis terlihat dari bidang ini, dimana mereka silih berganti menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Di awal tahun berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi H. Sukarmis sudah menduduki jabatan tersebut selama dua periode dan pada tahun 2014-2019 dan tahun 2019-2024 Andi Putra terpilih menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi fraksi partai Golkar, pada tahun 2019 Andi mendapatkan suara terbanyak pada Dapil I yang meliputi Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, dengan perolehan suara sebanyak 4.185 suara yang menghantarkan Andi kembali menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2020 Adam yang merupakan adik kandung Andi Putra dilantik untuk menggantikannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi karena Andi Putra terpilih menjadi Bupati pada perelatan Pemilu tahun 2020 kemarin.

3. Kekuasaan di Infrastruktur Politik

a. Kekuasaan Partai Politik

Menurut Robert Michels (Jurdi, 2014) menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Dalam sebuah partai kepentingan massa pemilihan yang telah membentuk kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya.

Dalam keluarga H. Sukarmis dimulai dari Sukarmis sendiri pada tahun 1999 menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi utusan dari partai Golkar, kemudian menjadi bupati selama dua periode pada tahun 2006-2011 dan 2011-2016. Kemudian ia menjadi Ketua

DPD II partai Golkar Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015, begitu pula dengan tiga orang anaknya yang berada di partai Golkar sejak awal.

Keluarga Sukarmis pada dasarnya memang sudah memiliki modal politik yang sangat kuat, karena dilihat dari awal munculnya Sukarmis, hingga ketiga anaknya pun diranah politik itu berasal dari partai Golkar. Andi Putra menggantikan Sukarmis sebagai Ketua DPD II partai Golkar pada tahun 2016, dan pada tahun 2021 ini menjadi Bupati fraksi partai Golkar, keluarga Sukarmis ini tidak lepas dari dukungan partai Golkar.

Andi Putra, akhirnya terpilih menjadi menjadi ketua DPD II Golkar Kuantan Singingi untuk lima tahun kedepan. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang juga putra dari mantan Bupati Kuansing, H. Sukarmis ini terpilih secara aklamasi untuk memimpin Golkar Kuansing pada Musda IV DPD II Golkar Kuansing yang digelar, Selasa (2/8/2016) malam di Teluk Kuantan. Sinyal akan terpilihnya Andi Putra sudah terlihat saat mantan Ketua DPD II Partai Golkar Kuansing, H. Sukarmis memberi sambutan saat pembukaan Musda. “Sudah saatnya Golkar Kuansing dipimpin kalangan muda yang enerjik dan mampu beradaptasi dengan kondisi kekinian,” ujar mantan Bupati dua periode ini (Riauair.com, 2016).

b. Bidang Bisnis

Sukarmis tidak hanya sukses dalam ruang politik tetapi ia juga memiliki beberapa usaha diluar dunia politik, Sukarmis memiliki usaha sebagai pengusaha kontraktor, pengusaha perkebunan sawit dan usaha perbengkelan.

Sukarmis mengatakan bahwa dirinya memiliki DO penjualan sawit dan PKS, begitu juga usaha kontraktor yang ditekuninya dari sejak muda sampai sekarang, yang mengerjakan proyek-proyek pemerintahan maupun perusahaan. Disamping itu ia juga memiliki perbengkelan yang dibangun di kawasan

desa Beringin Teluk Kuantan (Kuansingterkini.com, 2017).

Seperti yang diutarakan diatas, keluarga Sukarmis pada dasarnya memang sudah mempunyai modal yang sangat besar dan tidak pernah ketinggalan untuk berada didunia perpolitikan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimulai dari kepemimpinan di partai Golkar dan kemudian merambat pada Ketua DPRD dan jabatan Bupati pada akhirnya, mereka juga memiliki beberapa usaha di luar dunia politik.

4. Penyebab Berkembangnya Dinasti Politik H. Sukarmis

Beberapa ahli meneliti tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan dinasti politik pada sebuah daerah, bagaimana dinasti politik tersebut bisa berkembang dan bertahan, dalam penelitian ini penulis menampilkan beberapa pendapat ahli tentang penyebab berkembangnya dinasti politik yang memiliki gejala yang sama dengan dinasti politik H. Sukarmis di Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut (Teehankee, 2012) dalam jurnal penelitiannya tentang kasus dinasti politik di Filipina, politik dinasti berkembang dengan prinsip parton-klien, dimana ada perjanjian saling menguntungkan antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat tertentu. Sebagai elite yang berkuasa di Kabupaten Kuantan Singingi tentu H. Sukarmis dan keluarga juga memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencari dan mempertahankan dukungan di kalangan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil wawancara tokoh masyarakat , H. Sukarmis tidak asing lagi bagi masyarakat di sekitarnya karena memang mereka mempunyai modal sosial dan modal ekonomi yang menjadi faktor bertahannya eksistensi politik keluarganya yang berkecimpung di ranah politik, karena keluarga mereka sudah populer di masyarakat. Jadi, karena H. Sukarmis

mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang dapat dijadikan jaminan untuk hubungan timbal balik ini, mereka mampu memperbaiki ekonomi ataupun bantuan-bantuan lainnya terhadap masyarakat desa muaro sentajo dan mereka mendapatkan dukungan dan suara dan dukungan sebagai balasan, walaupun tidak ada perjanjian secara nyata namun hal ini seperti sudah menjadi kewajiban sebagai hubungan timbal balik.

Sumber kekuasaan lainnya yaitu berupa kekayaan, H. Sukarmis dan Keluarga selain sebagai elite politik mereka juga merupakan elite ekonomi. Berdasarkan data laporan LHKP tahun 2003 kekayaan H. Sukarmis sebesar Rp.2.596.000.000. pada tahun 2006 total kekayaannya meningkat sebanyak Rp.2.853.863.926 (Riauterkini.com, 2013). Berdasarkan hasil penelusuran MNC Portal dari laman elhkpn.kpk.go.id, Andi Putra tercatat mempunyai harta kekayaan sebesar Rp.3.724.520.00 (Rp3.7 Miliar). Harta kekayaan Andi meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi. Andi juga tercatat mempunyai mobil mewah merek Honda Jeep tahun 2012 seharga Rp.320 Juta. Dilaporkan, Andi Putra juga memiliki motor mereka Yamaha hasil sendiri seharga Rp.40 Juta. Andi Putra juga tercatat juga memiliki hutang sebesar Rp.285.480.000. jika diakumulasikan keseluruhan, total harta kekayaan Andi Putra yang dilaporkan ke KPK pada 31 Maret 2021 untuk periodik 2020 yakni sebesar Rp4.010.000.000 (Rp 4 Miliar) (IDXchannel.com, 2021).

Selain mempunyai modal ekonomi dan modal sosial keluarga H. Sukarmis, juga menguasai partai Golkar di Kabupaten Kuantan Singingi, partai pelopor masuknya keluarga H.Sukarmis di dunia politik, karena pada setiap langkah politik yang dilakukan oleh H. Sukarmis selalu dilatar belakangi oleh partai golkar. Selain itu H. Sukarmis dan Andi Putra pernah begilir menjadi Ketua DPD Partai Golkar mereka pernah menduduki jabatan

penting dalam partai Golkar dan mereka sekeluarga berada dalam partai Golkar.

Kemarin Minggu Tanggal (12/7/2020) partai Golkar pukul gong dinasti politik. Dalam putusannya partai pohon beringin itu dukung 2 anak dan 1 istri bupati periode di Riau maju Pilkada serentak 2020. Dari 9 Kabupaten dan kota di Riau yang akan mengikuti Pemilukada serentak 2020, DPP Partai Golkar baru menyerahkan 4 Surat Keputusan (SK) dukungan. Selebihnya 5 Kabupaten dan Kota masih menunggu SK. Dan ke 4 SK itu 3 Paslon dinasti politik. Pasangan calon yang didukung Golkar dalam Pemilukada serentak 2020 antara lain, untuk Kabupaten Kuantan Singingi, mantan Bupati Kuansing dua Periode, 2006-2016, Andi Putra, dipastikan akan mengikuti jejak sang ayah. Ketua DPRD Kuansing tersebut akan berpasangan dengan mantan anggota DPRD Riau dua periode dari dua partai berbeda, Suhardiman Amby. Suhardiman pernah menjadi anggota Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Hanura (Gardapos.com, 2020).

Dalam artikel ini dapat dilihat, salah satu dukungan partai Golkar terhadap perjalanan politik yang dilakukan H. Sukarmis dan keluarga. Kekayaan yang dimiliki oleh H. Sukarmis dan keluarga juga merupakan salah satu faktor pendukung eksistensi dan pengembangan dinasti politiknya, sama halnya pada kasus dinasti politik Ratut Atut Chosiyah di Banten, dinasti politik Atut mengalami gejala proliferasi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi, jabatan politik dan ormas yang berada dalam kendali (Sutisna, 2017).

Tabel 3. 1

Dominasi Keluarga H. Sukarmis di Partai Golkar

No.	Nama	Jabatan
1	H. Sukarmis	Ketua DPD II tahun 2015
2	Andi Putra	Ketua DPD II tahun 2016

3	Adam	Anggota
4	Romi Alfisyah Putra	Anggota

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Dalam kasus dinasti politik H. Sukarmis ini terdapat hal yang sama selain mereka mempunyai modal sosial dan modal ekonomi, mereka juga menguasai partai Golkar di Kuansing yang selalu melatarbelakangi terpilihnya keluarga H. Sukarmis dalam setiap jabatannya, baik di ranah birokrasi maupun pada jabatan politik. Dinasti politik H. Sukarmis juga mulai menyebar pada organisasi pemuda, organisasi keagamaan di Kuantan Singingi terlihat dari, tahun 2003-2016 Andi Putra menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kuantan Singingi, dan tahun 2017-2020 ia menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan cabang Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) yang artinya mereka juga mampu mendominasi organisasi tersebut dengan terpilihnya Andi Putra sebagai ketua.

Dalam penelitian (Mendoza, 2012) ia menganalisis keterkaitan antara dinasti politik legislatif nasional Filipina dan dampak sosial ekonomi di daerah tempat para anggota parlemen berasal; hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa dinasti politik mencakup 70% komposisi legislatif nasional (*House of Representative*) di mana daerah yang mewakili para anggota parlemen dengan dinasti politik yang kuat justru menunjukkan rendahnya standar hidup, standar kualitas sumber daya manusia, serta level ketidaksetaraan dan keterbelakangan yang tinggi.

Tabel 3. 2

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi 2010-2019

		Penduduk Miskin
--	--	-----------------

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)		
		Jumlah Total	Persentase
2010	325 060	36.70	12,57
2011	352 245	31.07	10,19
2012	371 530	31.26	10,29
2013	400 655	34.71	11,29
2014	422 691	33.52	10,75
2015	441 315	34.71	10,80
2016	468 199	31.22	9,85
2017	497 747	31.95	9,97
2018	521 591	32.10	9,92
2019	545 403	31.22	9,56

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/ BPS-Statistic Indonesia, National Socio-Economic Survey

Dari tabel 3.2 diatas menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2010-2019. Dalam waktu 9 (sembilan) tahun terakhir garis kemiskinan semakin bertambah, meskipun persentasenya menurun. Dapat di artikan kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi terus bertambah setiap tahunnya.

Tercatat Kuantan Singingi termiskin ketiga di Riau pada tahun 2018. Padahal pada tahun 2017, Kuantan Singingi termiskin keempat berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin di Kuansing bertambah dari tahun ketahun pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 31.220 orang, tahun 2017 sebanyak 31.950 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 32.100 orang (GoRiau, 2020).

Seperti yang disampaikan Ronald Mendoza, hubungan antara dinasti politik dan aspek sosial ekonomi rata-rata, dinasti politik tersebar di usia yang berada di daerah tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta kesenjangan dan pendapatan rata-rata lebih rendah. Kondisi ekonomi

lemah dalam sebuah daerah memiliki peluang lebih tinggi untuk membentuk dinasti politik semakin subur untuk berkembang. Dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Kuantan Singingi dapat mempengaruhi pengembangan dinasti politik tersebut.

Persebaran dan pertumbuhan (*proliferasi*) dinasti politik pada tingkat lokal dapat mempengaruhi sistem demokrasi dimana jabatan-jabatan politik akan bergulir dalam satu keluarga saja, orang lainnya selain keluarga akan sulit untuk mendapatkan jabatan, akan munculnya monopoli kekuasaan yang bisa berujung pada tindak korupsi.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis tampilkan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian Proliferasi Dinasti Politik di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2020, adapun kesimpulannya adalah, penyebab berkembangnya dinasti politik H. Sukarmis di Kuantan Singingi didasari adanya kekuasaan di bidang eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan sosial yang mereka miliki sejak awal, memberikan peluang besar untuk menyebarkan dan perluasan dinasti politik dengan melakukan praktik patron-klien, mereka juga menguasai partai politik (partai golkar), organisasi pemuda (KNIP), organisasi keagamaan (Tarbiyah-Perti). Kemiskinan di Kuantan Singingi juga merupakan penyebab proliferasi (penyebaran dan perluasan) dinasti politik H. Sukarmis di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis tunjukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Politik dinasti harus dibatasi karena, *pertama*, politik dinasti yang terjadi di daerah akan memperkokoh politik oligarkhi, jika jabatan-jabatan penting dalam lembaga eksekutif dan legislatif di kuasai oleh satu keluarga, maka akan mengganggu *checks and balance* yang akan berakibat penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga. *Kedua*, keluarga yang ikut dalam pemilukada akan memanfaatkan jaringan *incumbent* untuk memenangkan pertarungan yang menyebabkan proses tersebut tidak adil, apalagi keluarga sampai ikut tender-tender dalam proyek pemerintahan, dimana dana pemerintah dalam bentuk proyek mudah ditilap dan akan melahirkan KKN. *Ketiga*, politik dinasti ini tentu akan menutup peluang warga negara diluar keluarga untuk menjadi pejabat publik. Bila hal ini terjadi makan akan mengganggu nilai-nilai demokrasi, pembatasan politik dinasti diarahkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, dengan cara memperluas kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilukada dan menekan penyalahgunaan jabatan *incumbent*.

REFERENSI

Buku

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Agustino, L. (2011). *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era*

Sentralisasi. Bandung: Widaya Pdjadjaran.

- Agustino, L. (2014). *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, A. (2012). *Etika Politik*. Makassar: Alauddin University Press.
- Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. w. (2002). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif & Kuantatif*. Jakarta: KIK Press.
- Foucault, M. (2000). *Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedian.
- Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, I. (2009). *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press.
- Hidayat, S. (2007). *Shadow State? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*. Jakarta: Yayasan Bintang Obor Indonesia.
- Jurdi, F. (2014). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Keller, S. Z. (1984). *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Muliansyah, W. A. (2015). *Political: Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik Dan Welfare State*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Querubin, P. (2010). *Family and Politics: Dynastic Persistence in The Philippine*.
- Rahmat, H. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Penerbit Lestari.

Widjaja, H. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuhro, R. S. (2009). *Peran Aktor Dalam Demokrasi*. Yogyakarta: Ombak.

Artikel Ilmiah

Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*.

Foucault, M. (2000). *Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia.

Harrison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

Hidayat, I. (2009). *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press.

Hidayat, S. (2007). *Shadow State? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*. Jakarta: Yayasan Bintang Obor Indonesia.

Jurdi, F. (2014). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kompas.com:<https://amp.kompas.com/read/2010/06/28/08244331/Penyimpangan.Partai.Politik>

Berazam.com. (2021, Oktober 20). Diambil kembali dari Gubri Tunjuk Suhardiman Amby Sebagai Plt Bupati Kuansing: <https://www.brazam.com/read-120433-2021-10-20-gubri-tunjuk-suhardiman-amby-sebagai-plt-bupati-kuansing>

Gardapos.com. (2020, Juli 13). Diambil kembali dari Gong Dinasti Politik Mulai ditabuh di Pilkada Riau: <https://gardapos.com/read/cetak/read/1168/>

GoRiau. (2020, Februari 3). *GoRiau.com*. Diambil kembali dari <https://m.goriau.com/berita/baca/empat-tahun-dipimpin-mursini-halim-kuansing-termiskin-ketiga-di-riau.html>

Handoko, T. (2020, Februari 26). *Anomali Dinasti Politik*. Diambil kembali dari [riaupos.com: https://riaupos.jawapos.com/5805/opini/26/02/2020/anomali-dinasti-politik.html](https://riaupos.jawapos.com/5805/opini/26/02/2020/anomali-dinasti-politik.html)

Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis C515*, 138-158.

Holifah, N. (2018). Kekuatan Local Strongman dalam Pilkada Sampang 2012. *Jurnal Uniar*.

IDXchannel.com. (2021, 10 21). Diambil kembali dari Jadi Tersangka Korupsi, Intip harta Kekayaan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra : <https://www-idxchannel-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.idxchannel.com/amp/economics/jadi-tersangka-korupsi-intip-harta-kekayaan-bupati-kuantan-singingi-andi-putra>